

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara-negara yang sedang berkembang di dunia pasti dihadapkan dengan suatu masalah seperti kemiskinan dan pengangguran salah satunya Indonesia. Kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensional yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu sudut pandang primer dan sekunder. Pertimbangan utama termasuk kekayaan rendah, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan rendah. Aspek sekunder adalah jaringan sosial yang buruk, sumber daya keuangan dan informasi (Akbar et al., 2022). Pengurangan tingkat kemiskinan maupun pengangguran dapat diatasi oleh beberapa faktor yakni peningkatan produksi barang dan jasa atau PDRB maupun penguatan basis sumber daya manusia.

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah salah satu indikator untuk mengetahui pembangunan ekonomi yang dilihat dari taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk yaitu kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita. Indikator pembangunan manusia sudah menjadi instrument dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM) menjadi penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) sebab adanya keterbelakangan dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (yang tercermin oleh rendahnya PDRB per kapita).

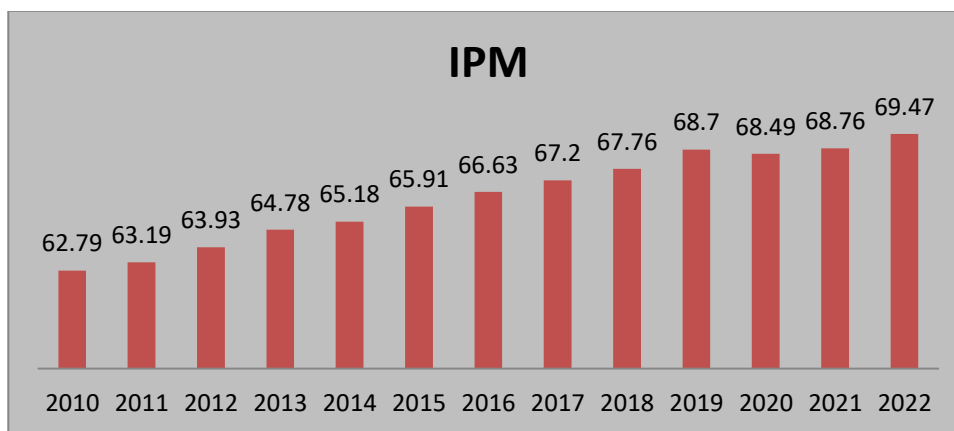
Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan

sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Utami, 2020). Suatu negara ekonomi tentu menginginkan kemajuan atau pembangunan yang signifikan, terlepas dari apakah kemajuan atau kemunduran negara tersebut tercermin dari keberhasilan pembangunan ekonominya. Pembangunan dianggap berhasil apabila dapat meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya (Akbar et al., 2022).

Maluku Utara termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi wilayah pulau-pulau dan memiliki luas wilayah mencapai 31.982 km². Dengan luas sebesar ini terbagi menjadi sepuluh Kabupaten/kota dimana rentang jarak tiap kabupaten cukup jauh dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.282.937 jiwa pada tahun 2020. Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya karena pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan non fisik mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk.

Menurut (Aprilia, 2015) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai penunjang dalam mengetahui pendapatan keseluruhan di wilayah yang mempunyai beberapa hal mendasar dalam proses IPM, yang mana dapat di tentukan pada yang bertahan hidup, pengetahuan, dan daya beli. Berikut ini merupakan angka IPM di Provinsi Maluku Utara cenderung stabil dalam 13 tahun terakhir :

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2022 (%)



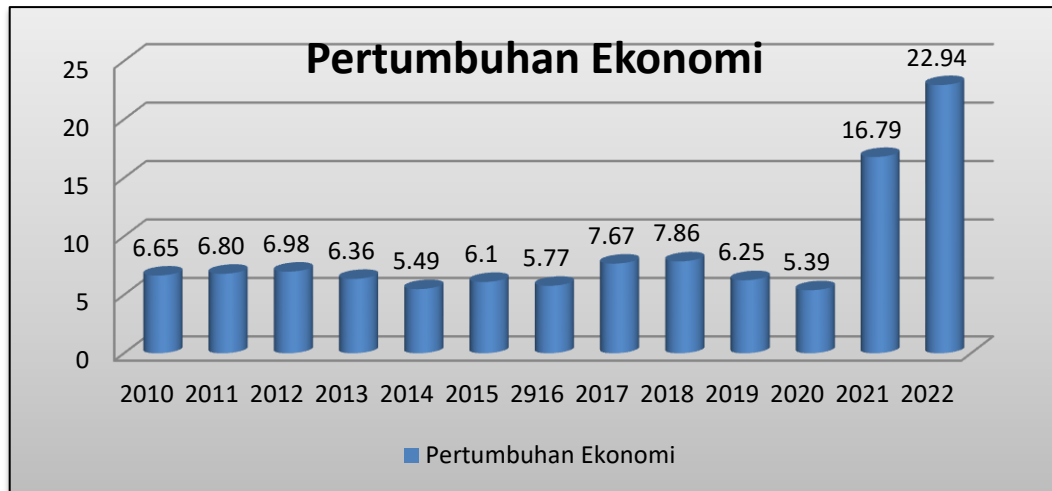
Sumber Data: BPS Maluku Utara Tahun 2010-2022 diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa IPM di Provinsi Maluku Utara pada 13 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan dan stabil, terlihat pada tahun 2010 angka IPM di Provinsi Maluku Utara sebanyak 62,79%, tahun 2011 naik menjadi 63,19%, sementara pada tahun 2012 mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 63,93%, dan pada tahun 2013 naik menjadi 64,78%. Lalu tahun 2019 nilai IPM Maluku Utara naik menjadi 68,70%, dan pada tahun 2020 IPM provinsi Maluku Utara mengalami sedikit penurunan menjadi sebanyak 68,49%. Sedangkan pada tahun 2022 indeks pembangunan manusia Maluku Utara berada di angka 69.47%.

Walapun IPM meningkat dari Tahun ke Tahun, namun tidak menjadi tolak ukur untuk melihat Pembangunan Manusia di Maluku Utara, karena data yang disediakan oleh Badan Pusat statistik (BPS) tidak menjadi fakta secara realitas. Maka perlu melihat realitas yang ada untuk mengkaji lebih dalam, karena IPM meningkat namun kemiskinan dan pengangguran masih terjadi di pelosok-pelosok daerah. Artinya, meningkatnya IPM tidak mengakar ke lapisan masyarakat di Provinsi Maluku Utara.

Selain itu pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil dari usaha dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang telah dilakukan oleh suatu negara atau suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan.

**Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara
Tahun 2010-2022 (%)**



Sumber Data: BPS Maluku Utara Tahun 2010-2022 diolah

Menurut badan pusat statistik, dalam tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebesar 6,65%, tahun 2011 naik menjadi 6,80%, sementara pada tahun 2012 mengalami kenaikan yaitu sebanyak 6,98% dan pada tahun 2013 sebesar 6,36%, di tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melambat dengan angka sebesar 5,49%. Dan dalam tahun 2015 tingkat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara kembali mengalami sedikit kenaikan menjadi 6,10%. Pada tahun 2016 provinsi Maluku Utara mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi kembali menjadi 5,77%, tetapi di tahun 2017 tingkat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mulai naik menjadi 7,67% dan dalam 2018 juga naik menjadi 7,86%. Namun mengalami penurunan secara drastis di tahun 2019 dan 2020 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 6,25% dan 5,39%. Pada tahun 2022 provinsi Maluku Utara berhasil mengalami kenaikan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 22,94%. Dimana jumlah ini termasuk yang terbesar di antara seluruh provinsi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat di tahun 2021 dan 2022 seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Seperti yang di jelaskan oleh Arsad (2004) bahwa suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu

sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangan baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Namun hanya menjadi angka bukan fakta, karena ketimpangan dan distribusi kesejahteraan belum terasa di lapisan masyarakat bawah

Penggunaan faktor-faktor produksi yang tepat sasaran baik dari segi sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang dimiliki dalam suatu daerah tentunya menunjukan lemahnya problem kemanusiaan salah satunya yakni pengangguran. Peningkatan pengangguran tentunya akan memberikan peluang peningkatan kemiskinan sebab kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Upaya menurunkan tingkat pengangguran dalam masyarakat dengan mempunyai pekerjaan dan penghasilan, sebab dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah.

Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi. Masyarakat miskin memiliki daya beli yang rendah sehingga efek multiplier pun menjadi kecil yang akan membuat pertumbuhan ekonomi tidak mampu tumbuh dengan cepat (Utami, 2020). Pengangguran dan kemiskinan ialah suatu hal yang paling utama di alami oleh sebuah negara berkembang.

Dilihat dari fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran di Provinsi Maluku Utara”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas menunjukkan adanya kontradiksi dilihat dari data IPM Provinsi Maluku Utara tiap tahunnya terjadi peningkatan dari tahun 2010-2022 dan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung berfluktuasi, begitupun dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara 2010-2022. Maka di perlukan suatu studi yang dapat menggambarkan serta membuktikan, jika dikaitkan dengan data indeks pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara yang tiap tahunnya meningkat maupun PDRB maka sejauh mana pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan yang bisa mengalami penurunan. Maka penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat Pengangguran di Provinsi Maluku Utara?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap tingkat Pengangguran di Provinsi Maluku Utara?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan melalui Pengangguran di Provinsi Maluku Utara?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan melalui Pengangguran di Provinsi Maluku Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara.
2. Untuk menganalisis Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap tingkat Pengangguran di Provinsi Maluku Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini di tunjukan untuk dapat memberi saran kepada pemerintah di provinsi Maluku Utara dalam mengevaluasi kebijakan terhadap kualitas hidup penduduk dalam indeks pemabangunan manusia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai literatur empirik terkait pengaruh indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan yang akan menambah pengetahuan penelitian sejenis dan akan menjadi rujukan bagi pengembangan penelitian yang sama dikemudian hari.